



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASIS HIDAYANTI**
2. Jabatan : **PANITERA MUDA PERKARA HUKUM**
3. NHK : **443765**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **195.450.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/190 m2 di BUNGSAN BEDAHAN TIMUR RT. 3 RW. 3 Kode Pos. 16519, [unknown], WARISAN Rp. 195.450.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **140.650.000**

1. MOBIL, SUZUKU APV ARENA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, HONDA GL160 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 23.650.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **5.600.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **8.624.343**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **350.324.343**

III. HUTANG Rp. **110.670.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **239.654.343**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.